



**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ)**

**Tahun
2025**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**Jl. Jenderal Sudirman No.6 Benteng
KAB.KEPULAUAN SELAYAR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

Penyusun LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta tanggungjawab masing-masing serta dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tujuan LKPJ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran yang sewajarnya mengenai keadaan perkembangan, permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.

Kepulauan Selayar, Januari 2026

**Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan**

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660507 198603 1 022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.....	1
1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi....	2
1.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural.....	15
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN	
PEMERINTAHAN	20
2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	20
2.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	23
2.1.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama.....	43
2.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan.....	44
2.1.4. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja	46
2.1.5 Inovasi	50
2.1.6. Prestasi/Penghargaan.....	50
2.2. Kebijakan Daerah (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah.....	51

2.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap	
LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025	51
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAAN DAN PENUGASAN.....	52
BAB IV PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tipe Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kabupaten Kepulauan Selayar
Tlp/Fax : (0144) 22120
Email : Perpustakaan.arsip.selayar@gmail.com
Website : Perpustakaan.kepulauanselayarkab.go.id
Titik koordinat : 6°07'06,4"S 120°27'31,6"E
Foto Gedung Kantor :



Informasi Sejarah Singkat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Perkembangan zaman yang demikian pesatnya membuat masyarakat semakin tak bisa dipisahkan dari informasi. Sadar atau tidak, manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan informasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh informasi, salah satunya juga adalah dengan membaca. Menurut Bamberger (dalam Astrid 1982) pembaca itu terbagi 2 kelompok yaitu Pembaca Permanen dan Pembaca Secara Umum atau Sepintas. Kedua kategori tersebut akan sangat terbantu dengan adanya Perpustakaan.

Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Kepulauan Selayar didirikan atas bantuan **Bapak H. Tanri Abeng, MBA** yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan BUMN, dan diresmikan juga oleh beliau pada tanggal 26 Juni 1999, dan diperdakan tanggal 7 Juli 1999 No. 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja perpustakaan Umum.

Perpustakaan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2001 dengan gedung berlantai 2 (dua) seluas 707 M² / 141 M² terletak dipusat kota Benteng (Ibu kota Kab. Kepulauan Selayar), Benteng. Diawal berdirinya Perpustakaan adalah sebuah kantor yang bergabung dengan Arsip Daerah pada waktu itu, dengan adanya gedung sendiri Perpustakaan maka sejak itu Perpustakaan berubah nama dari Perpustakaan Anak Kukang menjadi Perpustakaan Umum Daerah, namun tahun 2006 Kantor Perpustakaan berada di bawah naungan Diknas dan berubah menjadi UPTD Perpustakaan, dan Tahun 2009 Perpustakaan berubah nama lagi menjadi Kantor Perpustakaan dan Arsip dan kembali berdiri sendiri dimana langsung bertanggung jawab kepada Bupati dan berubah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2017.

1.2 Struktur Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Perangkat Daerah

1.1 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Berdasarkan Peraturan Bupati No 134 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi adalah unsur pembantu Bupati sebagai penyelenggara pemerintah bidang Pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang disebut Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas pokok membuat rumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan berdasarkan kewenangan yang ada, memberikan pelayanan umum kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya.

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan daerah.
- b. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantita skoleksi perpustakaan.
- d. Membina semua jenis perpustakaan.
- e. Menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan.
- f. Membina dan mengembangkankompotensi, profesionalitas pustakawan dan arsiparis.
- g. Memberikan layanan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Setiap jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan,
- d. pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas adalah :

- menyusun rencana kerja dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- menyelenggarakan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- menyelenggarakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangannya;
- mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis perpustakaan dan kearsipan;
- menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran Dinas;
- b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;

- c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup dinas;
- e. pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- f. pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun tugasnya, adalah :

- menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur kabupaten;
- melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
- melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas;
- melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang Perpustakaan dan kearsipan;
- melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;

- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Sub Bagian Program Dan Keuangan

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi, pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga, mengelola administrasi kepegawaian serta pelaporan keuangan, dengan tugas :

- menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- menyiapkan bahan penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah;
- memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja perangkat daerah;
- menyusun program dan kegiatan perangkat daerah dalam Dokumen Perencanaan;
- menyusun dokumen evaluasi perangkat daerah;
- melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan perangkat daerah;
- memfasilitasi penjangkaran Inovasi Daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- mengoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Dinas;
- menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan anggaran;
- melakukan fasilitasi kebendaharaan;

- melakukan pengelolaan keuangan dan pemeliharaan dokumen keuangan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- melakukan pengelolaan, pengendalian, dan evaluasi penatausahaan keuangan dibidang perpustakaan dan kearsipan;
- melakukan urusan pengujian terhadap dokumen keuangan;
- melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
- memfasilitasi penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
- menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan keuangan;
- melakukan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- melakukan pengelolaan dan penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan;
- menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- menyusun laporan keuangan bulanan/semesteran;
- menyusun laporan *Prognosis* Realisasi Anggaran;
- menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan Keuangan, serta memberikan saran pertimbangan kepada Pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Sub Bagian Hukum, Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan serta mengelola administrasi hokum, dengan tugas :

- menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian

dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- melakukan pengelolaan aset, perlengkapan, dan rumah tangga;
- mengoordinir pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan kantor;
- melakukan pengelolaan administrasi perkantoran;
- melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- melakukan pengarsipan dan ekspedisi;
- melakukan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar bekerja sama dengan unit kerja yang membidangi pengembangan kompetensi;
- melakukan kebijakan pimpinan terkait penegakan disiplin pegawai lingkup Dinas;
- memfasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- melakukan pengarsipan dokumen peraturan perundang-undangan bidang perpustakaan dan kearsipan;
- melakukan analisa beban kerja dan analisa jabatan lingkup Dinas;
- melakukan analisa kebutuhan pegawai lingkup Dinas;
- melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- melakukan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Perpustakaan

Bidang Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perpustakaan, dengan tugas :

- menyusun rencana kegiatan Bidang Perpustakaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perpustakaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan pengembangan koleksi, pengolahan, dan konservasi bahan perpustakaan melalui pembelian, hadiah, hibah, dan tukar menukar bahan perpustakaan;
- melaksanakan layanan, alih media, dan otomasi perpustakaan;
- melaksanakan pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- melaksanakan hunting, seleksi, inventarisasi dan desiderata bahan perpustakaan;
- melaksanakan penganekaragaman bahan perpustakaan yang mencakup kegiatan transliterasi (alih aksara), translasi (terjemahan), dan sejenisnya;
- melaksanakan pemetaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content) di wilayahnya;
- melaksanakan pengumpulan, penghimpunan, pengelolaan naskah kuno dan koleksi daerah (local content);
- melaksanakan penerimaan, pengolahan, dan verifikasi bahan perpustakaan;
- melaksanakan penyusunan deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, dan penyelesaian fisik bahan perpustakaan;
- melaksanakan verifikasi, validasi, pemasukan data ke pangkalan data dan fumigasi bahan perpustakaan;
- melakukan penyusunan literature sekunder dan survei kondisi bahan perpustakaan;
- melaksanakan layanan sirkulasi, layanan informasi, layanan referensi, layanan pinjam antar perpustakaan dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling);
- melaksanakan stock opname dan penyiapan bahan perpustakaan (weeding) serta menyusun statistic perpustakaan;

- menyediakan kotak saran untuk menampung kebutuhan pemustaka terhadap koleksi perpustakaan;
- melaksanakan pengembangan dan pengelolaan kerja sama antar perpustakaan;
- melaksanakan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan dalam bentuk micro film maupun digital;
- melaksanakan perekaman, pencucian dan penduplikasian bahan perpustakaan;
- melaksanakan pemeliharaan dan penyimpanan master reprografi, fotografi dan digital;
- melaksanakan pengelolaan dan pengembangan perangkat keras, lunak dan pangkalan data serta jaringan otomasi perpustakaan dan website;
- melaksanakan pemasyarakatan/sosialisasi, dan evaluasi pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
- melaksanakan bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan bagi pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan;
- melaksanakan pengkajian minat baca masyarakat dan pembudayaan kegemaran membaca;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis dibidang perpustakaan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang perpustakaan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Adapun fungsinya, adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang perpustakaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perpustakaan;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perpustakaan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Kearsipan

Bidang Kearsipan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kearsipan, dengan Fungsi :

- perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- pelaksanaan kebijakan teknis bidang kearsipan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan;
- pelaksanaan administrasi di bidang kearsipan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- menyusun rencana kegiatan Bidang Kearsipan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kearsipan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- melaksanakan pengkajian dan penyusunan kebijakan daerah dibidang kearsipan;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan arsip dinamis;
- melaksanakan akuisisi, pengolahan dan preservasi arsip;
- melaksanakan layanan dan pemanfaatan arsip;
- melaksanakan sosialisasi, bimbingan dan supervisi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, perusahaan, organisasi masyarakat/organisasi politik, masyarakat dan lembaga pendidikan;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada perangkat daerah, desa/kelurahan, perusahaan, organisasi masyarakat/organisasi politik, masyarakat, dan lembaga pendidikan;
- melaksanakan pembinaan kepada unit pengolah dalam menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;
- menyediakan, mengolah, dan menyajikan arsip inaktif untuk kepentingan penggunaan internal dan kepentingan publik;
- melaksanakan pemeliharaan arsip inaktif melalui kegiatan penataan dan penyimpanan arsip inaktif;
- melaksanakan pengaturan fisik aktif, pengolahan informasi arsip dan penyusutan daftar arsip inaktif;

- melaksanakan pemindahan arsip inaktif di lingkungan Pemerintah Daerah;
- melaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip dan daftar arsip;
- melaksanakan persiapan penyerahan dan penetapan status arsip statis;
- mengusulkan pemusnahan arsip;
- melaksanakan penerimaan dan penataan informasi arsip statis;
- menyusun guide, daftar dan inventaris arsip statis;
- melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan perlindungan arsip statis;
- melaksanakan perawatan dan perbaikan arsip statis serta penyelamatan arsip statis akibat bencana;
- melaksanakan alih media dan reproduksi serta pengujian autentisitas arsip statis;
- melaksanakan layanan arsip statis dan dinamis;
- melaksanakan penyajian arsip menjadi informasi;
- melaksanakan pengelolaan jaringan informasi kearsipan nasional;
- melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- menyusun standar operasional prosedur penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- menyediakan daftar dan penetapan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup;
- mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang kearsipan;
- melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- menyusun laporan pelaksanaan tugas kepala bidang kearsipan dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g. Jabatan Fungsional

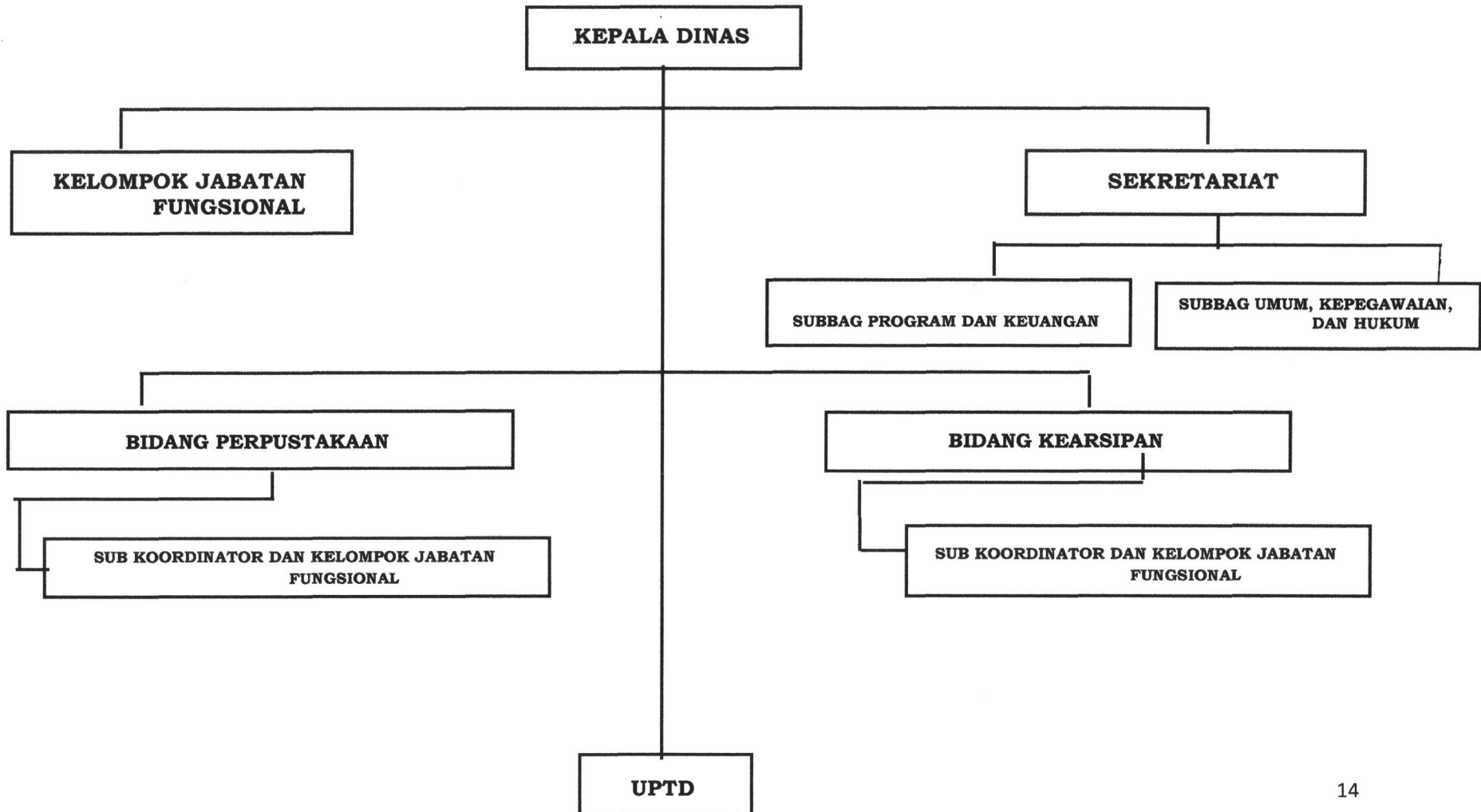
1. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
2. Pengangkatan jabatan fungsional pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan hasil analisis

kebutuhan dan formasi, serta ketentuan peraturan perundang undangan

Adapun jabatan fungsional di lingkungan Dinas perpustakaan dan Kearsipan adalah :

- Pustakawan
- Arsiparis
- Pranata Komputer

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



1.3. Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran suatu instansi baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar di dukung sumber daya manusia yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara berdasarkan dari jumlah, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta berdasarkan pejabat struktural dengan kondisi sebagai berikut:

Tabel 1.3.1

Jumlah Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
1.	Laki - laki	8
2.	Perempuan	14
Jumlah		21

Sumberdaya Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan. Merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan tugas karena dengan dukungan pendidikan yang baik maka profesionalisme ASN dapat terwujud.

Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.2

Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2025

NO	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Pasca Sarjana (S-2)	4
2.	Sarjana (S-1)	11
3.	Diploma	3
4.	SMA/Sederajat	3
5.	SMP	0
6.	SD	0
	Jumlah	21 orang

Sumberdaya Berdasarkan Struktur Jabatan Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.3

Keadaan Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Struktur Jabatan Tahun 2025

NO	STRUKTUR JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	3
3.	Eselon IV	2
4.	Non Eselon	6
5.	Fungsional	9
	Jumlah	21 orang

Sumberdaya Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan pangkat dan golongan ruang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3.4
Keadaan Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2025

NO	PANGKAT	GOLONGAN RUANG	JUMLAH (ORANG)
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	2
2.	Pembina Tk. 1	IV/b	0
3.	Pembina	IV/a	4
4.	Penata Tk. 1	III/d	6
5.	Penata	III/c	4
6.	Penata Muda Tk.1	III/b	1
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Pengatur Tk. 1	II/d	1
9.	Pengatur	II/c	0
	Jumlah		21 orang

Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Pelayanan Publik memiliki fasilitas sarana dan prasarana berupa:

- Gedung Kantor 2 unit
- Mobil Perpustakaan Keliling 2 Unit
- Mobil jabatan 1 unit
- Kapal pustaka 1 unit
- Jolloro 1 unit (rusak berat)
- Ruang layanan umum
- Ruang baca anak
- Ruang layanan refrensi
- Ruang pengolahan bahan pustaka
- Ruang baca

- Ruang Layanan Internet
- Ruang Depo untuk kegiatan penyimpanan dokumen arsip in aktif

Berdasarkan kondisi per 31 Desember 2025 sarana dan prasarana berupa peralatan dan perlengkapan selain aset mobilitas yang dipergunakan untuk terlaksananya ketugasan dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.5
Sarana dan Prasarana Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun 2025

No.	Jenis	Jumlah	Satuan
1.	Meja baca pelayanan umum	24	unit
2.	Meja arsip	2	unit
3.	Kursi dan meja baca anak	4	set
4.	Meja kerja ½ biro	10	unit
5.	Meja Kerja 1 biro	1	unit
6.	Meja komputer	14	unit
7.	Meja sirkulasi	2	unit
8.	Meja piket	1	unit
9.	Meja pengolahan	1	unit
10.	Meja/kursi tamu/sofa	3	set
11.	Kursi kayu panjang	2	unit
12.	Kursi staf	50	unit
13.	Bangku panjang	2	unit
14.	Rak buku besi	14	unit
15.	Rak buku kayu	3	unit
16.	Rak majalah besi	8	unit
17.	Lemari referensi	5	unit

18.	Lemari laci katalog	3	unit
19.	Lemari arsip	1	paket
20.	Lemari penitipan barang	10	unit
21.	Lemari kayu	2	unit
22.	Filling cabinet besi	8	unit
23.	Filling cabinet plastik	1	unit
24.	Partisi	7	unit
26.	Komputer khusus layanan	12	unit
27.	Kursi sandaran tinggi	1	unit
28.	Kursi sandaran pendek	1	unit
29.	Meja kerja 1 biro	1	unit
30.	Komputer PC	4	unit
31.	Notebook laptop	11	unit
32.	Komputer arsip	1	paket
33.	AC	13	unit
34.	Kipas angin	3	unit
35.	Printer	11	unit
36.	Mesin scanner	1	unit
37.	Mesin press	1	unit

Sarana dan Prasarana tersebut diatas dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, sehingga guna menjaga kondisinya tetap layak pakai diperlukan biaya pemeliharaan. Sedangkan untuk sarana dan prasarana yang rusak perlu dilakukan pengadaan kembali.

BAB II

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Urusan Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Rangkaian program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025 ini adalah bagian integral dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar. Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 3.660.437.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 3.613.870.700,- dan Belanja Modal Rp.46.566.300,- selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran keseluruhan berubah menjadi Rp.3.162.413.000,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 3.095.003.000,- dan Belanja Modal Rp.67.410.000,-. Perubahan anggaran ini dilakukan karena pertimbangan efisiensi anggaran. Dari total anggaran sebesar Rp. 3.162.413.000,- anggaran yang terbelanjakan sebesar Rp.2.965.472.335,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp.196.940.665,- dengan realisasi keuangan sebanyak 93,77%.

Program dan kegiatan dilaksanakan setiap tahun dengan penekanan prioritas kinerja sesuai dengan kebutuhan pada setiap tahun yang telah direncanakan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 melaksanakan Program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan 4 program dan 13 kegiatan dengan 34 sub kegiatan.

Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
sub kegiatan:
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusuna DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
sub kegiatan
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
sub kegiatan
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
sub kegiatan
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
sub kegiatan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
sub kegiatan
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
sub kegiatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Pembinaan Perpustakaan
 - a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan:
 - Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
 - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
 - Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
 - b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub kegiatan:
 - Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
 - Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat
3. Program Pengelolaan Arsip
 - a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
 - b. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN
 - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
 - a. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

2.1.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Capaian Kinerja berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang berdasarkan RKPD/RENJA dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGA TASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOM ENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	RKPD Tahun 2025	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	91%	93,77%			
					71,51%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 3.063.392.400,-	Realisasi Anggaran Rp. 2.873.721.241,-			
			DPA Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	Terdapat sub-kegiatan yang memiliki sisa anggaran tapi capaian kinerja sudah mencapai 100%		
					Alokasi Anggaran Rp. 16.900.000,-	Realisasi Anggaran Rp. 13.941.829,-			

				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen Alokasi anggaran Rp. 1.700.000,-	1 Dokumen Realisasi anggaran Rp 1.185.496,-			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen Alokasi anggaran Rp. 1.800.000,-	1 Dokumen Realisasi anggaran Rp. 1.480.781,-			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen Alokasi anggaran Rp. 1.800.000,-	1 Dokumen Realisasi anggaran Rp 1.475.629,-			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	1 Dokumen Alokasi anggaran Rp. 2.700.000,-	1 Dokumen Realisasi anggaran Rp. 2.363.020,-			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen Alokasi anggaran Rp. 2.700.000,-	1 Dokumen Realisasi anggaran Rp 2.363.020,-			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan Alokasi anggaran Rp. 2.400.000,-	2 Laporan Realisasi anggaran Rp. 1.856.169,-			

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 laporan	13 laporan			
					Alokasi anggaran Rp. 3.00.000,-	Realisasi anggaran Rp. 3.261.530,-			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	Terdapat sub keg. Yang memiliki sisa anggaran tetapi capaian kinerja sudah mencapai target 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 2.239.633.230,-	Realisasi anggaran Rp. 2.079.111.151,-			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	Dianggarkan lebih dari jumlah pegawai		
					Alokasi anggaran Rp. 2.226.633.230,-	Realisasi anggaran Rp. 2.068.958.019,-			
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 10.600.000,-	Realisasi anggaran Rp. 7.976.849,-			

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 2.400.000,-	Realisasi anggaran Rp. 2.176.283,-			
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	Terdapat sisa belanja ATK tapi capaian kinerjanya sudah 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 13.617.800,-	Realisasi anggaran Rp. 11.708.128,-			
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 13.617.800,-	Realisasi anggaran Rp. 11.708.128,-			
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
					Alokasi anggaran Rp. 30.000,-	Realisasi anggaran Rp.300.000,-			

				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	2 Orang	2 Orang			
					Alokasi anggaran	Realisasi anggaran			
					Rp. 300.000,-	Rp. 300.000,-			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	Terdapat beberapa sub keg. Yang memiliki sisa anggaran tetapi capaian kinerja sudah mencapai target 100%		
					Alokasi anggaran	Realisasi anggaran			
					Rp. 226.161.900,-	Rp. 219.559.575,-			
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket	1 Paket	Terdapat sisa dari belanja alat listrik karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/ rekanan		
					Alokasi anggaran	Realisasi anggaran			
					Rp. 9.559.500,-	Rp. 8.940.898,-			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	1 Paket	Terdapat sisa dari belanja perabot kantor karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/ rekanan		
					Alokasi anggaran	Realisasi anggaran			
					Rp. 5.600.000,-	Rp. 5.065.950,-			

				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	Target capaian kinerja sudah mencapai 100% selama 1 Tahun sehingga kelebihan dana sudah tidak dipergunakan lagi		
					Alokasi anggaran Rp. 20.347.700,-	Realisasi anggaran Rp.16.760.591,-			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	20 Dokumen	20 Dokumen	Target capaian kinerja sudah mencapai 100% selama 1 Tahun sehingga kelebihan dana sudah tidak dipergunakan lagi		
					Alokasi anggaran Rp. 9.156.500,-	Realisasi anggaran Rp.8.939.250,-			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	150 Laporan	Terdapat sisa anggaran dari biaya penginapan karena standar biaya pada DPA lebih tinggi dibandingkan hotel tempat menginap		
					Alokasi anggaran Rp. 154.653.000,-	Realisasi anggaran Rp. 154.527.000,-			
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/ rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 26.845.200,-	Realisasi anggaran Rp. 25.325.886,-			

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
					Alokasi anggaran	Realisasi anggaran			
					67.410.000	66.219.702			
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11 Unit	11 Unit	Terdapat sisa dari belanja pengadaan karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/ rekanan		
					Alokasi Anggaran 67.410.000	Realisasi anggaran 66.219.702			
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Terdapat sub keg. Yang memiliki sisa anggaran tetapi capaian kinerja sudah mencapai target 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 265.559.900,-	Realisasi anggaran Rp. 252.652.988,-			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			
					Alokasi anggaran R. 1.300.000,-	Realisasi anggaran Rp. 1.300.000,-			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	Adanya sisa dana dikarenakan pemakaian listrik dan air tidak bisa terukur dalam setiap bulannya sehingga selalu		
					Alokasi anggaran Rp. 88.353.000,-	Realisasi anggaran Rp. 76.539.588,-			

							dianggarkan lebih. Namun capaian target untuk Tahun 2025 sudah tercapai 100%		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 175.906.900,-	Realisasi anggaran Rp. 174.813.400,-			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	Terdapat sub keg. Yang memiliki sisa anggaran tetapi capaian kinerja sudah mencapai target 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 327.896.930,-	Realisasi anggaran Rp. 306.039.210,-			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13 unit	13 unit	Target capaian kinerja sudah mencapai 100% untuk 13 unit selama 1 Tahun sehingga kelebihan dana sudah tidak dipergunakan lagi		
					Alokasi anggaran Rp. 180.750.000,-	Realisasi anggaran Rp. 179.682.868,-			

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38 unit	38 unit	Target capaian Kinerja sudah mencapai 100% untuk 38 unit selama 1 tahun sehingga kelebihan dana sudah tidak dipergunakan lagi		
					Alokasi anggaran Rp. 26.260.000,-	Realisasi anggaran Rp. 26.244.000,-			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	2 unit	Target capaian Kinerja sudah mencapai 100% untuk 2 unit selama 1 tahun sehingga kelebihan dana sudah tidak dipergunakan lagi		
					Alokasi anggaran Rp. 26.799.570,-	Realisasi anggaran Rp. 24.301.000,-			
2.				Program Pembinaan Perpustakaan	50,22% 14.471	48,03% 14.477			
					Alokasi anggaran Rp. 53.311.600,-	Realisasi anggaran Rp. 51.479.191,-			
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75%	75%	Terdapat sisa dana dari belanja ATK tapi capaian kinerja sudah mencapai 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 40.218.600,-	Realisasi anggaran Rp. 38.974.641,-			

				Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	4 Layanan	4 Layanan	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 3.932.000,-	Realisasi anggaran Rp. 3.509.499,-			
				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	300 Exp.	300 Exp.	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 5.397.500,-	Realisasi anggaran Rp. 4.922.319,-			
				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	20 Dokumen	20 Dokumen	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 30.889.100,-	Realisasi anggaran Rp. 30.542.823,-			
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Terdapat sisa dana dari belanja ATK tapi capain kinerja sudah mencapai 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 13.093.000,-	Realisasi anggaran Rp. 12.504.550,-			
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya		

					Alokasi Anggaran Rp. 8.498.700,-	Realisasi Anggaran Rp. 8.112.109,-	pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	1 Lokus	Terdapat sisa dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi Anggaran 4.594.300	Realisasi Anggaran 4.392.441			
3.	Kearsipan			Program Pengelolaan Arsip	15,7 %	39,47 %			
					Alokasi anggaran Rp. 45.709.000,-	Realisasi anggaran Rp. 40.271.903,-			
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	90 %	90 %	Terdapat sub keg. Yang memiliki sisa anggaran tetapi capaian kinerja sudah mencapai target 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 9.132.100,-	Realisasi anggaran Rp. 8.447.949,-			
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	20 Arsip	20 Arsip	Terdapat sisa dana dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi anggaran Rp. 9.132.100,-	Realisasi anggaran Rp. 8.447.949,-			

				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat sisa dana dari belanja ATK tapi capain kinerja sudah mencapai 100%		
					Alokasi anggaran Rp. 15.341.700,-	Realisasi anggaran Rp. 10.780.300,-			
				Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	1 Pengguna	1 Pengguna			
					Alokasi anggaran Rp. 0,-	Realisasi anggaran Rp. 0,-			
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	Terdapat sisa dana dari belanja ATK dan SPPD		
					Alokasi anggaran Rp. 15.341.700,-	Realisasi anggaran Rp. 10.780.300,-			
4.				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	10%	100%			
					Alokasi Anggaran Rp. 21.235.200,-	Realisasi Anggaran Rp. 21.043.654,-			
				Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	95%	95%	Terdapat sisa dana dari belanja ATK tapi capain kinerja sudah mencapai 100%		
					Alokasi Anggaran Rp. 21.235.200,-	Realisasi Anggaran Rp. 21.043.654,-			

				Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	25 Arsip	25 Arsip	Terdapat sisa dana dari belanja ATK karena standar biaya pada DPA tidak sesuai dengan standar harga penyedia/rekanan		
					Alokasi Anggaran Rp. 21.235.200,-	Realisasi Anggaran Rp. 21.043.654,-			
					100%	100%	93,77%		
				JUMLAH	Rp.3.162.413.000	Rp. 2.965.472.335	Realisasi Anggaran		

Selanjutnya tabel diatas menjelaskan realisasi kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan kegiatan :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.700.000 dipergunakan untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja (RENJA). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 1.185.496 atau 69,74% sedangkan target capaiannya sebanyak 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.800.000 dipergunakan untuk menyusun Dokumen RKA-SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.480.781 atau 82,27% sedangkan target capaiannya sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.800.000 dipergunakan untuk menyusun Dokumen Perubahan RKA-SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.475.629 atau 81,98% dan target capaian kinerja sebanyak 1 dokumen dan terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.700.000 dipergunakan untuk menyusun DPA-SKPD dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.363.020 atau 87,52% sedangkan target capaiannya 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.700.000 dipergunakan untuk menyusun Dokumen Perubahan DPA-SKPD dengan ralisasi keuangan sebesar Rp. 2.319.204 atau 85,90% sedangkan target capaiannya 1 Dokumen dan terealisasi sebanyak 1 Dokumen atau 100%
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.400.000 dipergunakan untuk menyusun laporan LPPD dan Laporan LKPJ dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.856.169 atau 77,34%. Sedangkan target capaian kinerjanya sebanyak 2 Laporan dan terealisasi sebanyak 2 Laporan atau 100%

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.800.000 dipergunakan untuk menyusun LAKIP dan RFK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.261.530 atau 77,34%. Sedangkan target capaian kinerjanya sebanyak 13 Laporan dan terealisasi sebanyak 13 Laporan atau 100%
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.226.633.230 dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.068.958.019 atau 92,92%. Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS ini tidak 100% realisasi keuangannya tetapi target capaian kinerjanya sudah 100% yaitu semua ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sudah terbayarkan gaji dan tunjangannya untuk 20 orang selama 12 Bulan atau 1 Tahun
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.600.000 dipergunakan untuk menyusun laporan akuntansi SKPD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.976.849 atau 75,25%. Sedangkan target capaian kinerjanya sebanyak 6 dokumen dan terealisasi sebanyak 6 dokumen atau 100%
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 2.400.000 dipergunakan untuk menyusun laporan keuangan akhir tahun dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.176.283 atau 90,68% sedangkan target capaian kinerja sebanyak 1 Laporan dan terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100%
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 13.617.800 dipergunakan untuk pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada dinas perpustakaan dan kearsipan diantaranya tersedianya administrasi BMD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.708.128 atau 85,98% sedangkan target capaian kinerja sebanyak 1 Laporan dengan realisasi 1 Laporan atau 100%
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan alokasi dana sebesar Rp. 300.000 dipergunakan untuk pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000 atau 100%. Target capaian kinerja sebanyak

2 orang pegawai dan realisasi sebanyak 2 orang pegawai atau 100%

- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
- Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.559.500 dipergunakan untuk menyediakan peralatan dan komponen listrik berupa balon lampu, colokan dll dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.940.898 atau 93,53% sedangkan target capaian kinerja sebanyak 1 Paket dan terealisasi sebanyak 1 Paket atau 100%.
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.600.000 dipergunakan untuk menyediakan peralatan perabot kantor atau alat kebersihan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.065.950 atau 90,46% sedangkan target capaian sebanyak 1 Paket dan realisasinya sebanyak 1 Paket atau 100%
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 20.347.700 dipergunakan untuk penggandaan dokumen dan cetak spanduk dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 16.760.591 atau 82,37% ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.424.800 dikarenakan target capaian selama 1 Tahun sudah terealisasi 100%. Sehingga kelebihan dana tersebut sudah tidak dipergunakan lagi
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.156.500 dipergunakan untuk penyediaan surat kabar dan majalah yang kemudian dijadikan koleksi perpustakaan, penyediaan tersebut terealisasi keuangannya sebesar Rp. 8.939.250 atau 97,63% ada sisa anggaran sebesar Rp. 217.250 dikarenakan target capaian kinerja sudah terealisasi sebanyak 20 Dokumen atau 100% sehingga kelebihan dana tersebut sudah tidak dipergunakan lagi
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 154.653.000 dipergunakan untuk perjalanan dinas luar dan dalam daerah dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 154.527.000 atau 99,92%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 126.000 Sisa anggaran ini adalah sisa anggaran biaya penginapan karena standar biaya pada DPA lebih tinggi, sedangkan bill hotel tempat menginap para ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah umumnya lebih murah sehingga ada anggaran yang tidak terealisasi. Sedangkan target capaian sebanyak 100 laporan dan terealisasi sebanyak 150 laporan perjalanan dinas atau 100%

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.845.200 dipergunakan untuk penyediaan kebutuhan barang pakai habis perkantoran dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.325.886 atau 94,34%. Terdapat sisa anggaran dari belanja ATK sebesar Rp. 1.519.314 dikarenakan standar biaya yang ada pada DPA tidak sesuai dengan standar harga dari penyedia/rekanan.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 67.410.000 dipergunakan untuk pengadaan AC, Laptop dan Printer dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.219.702 atau 98,23%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.190.298 dikarenakan standar biaya yang ada pada DPA tidak sesuai dengan standar harga dari penyedia/rekanan. Sedangkan target capaian kinerja 11 unit dan terealisasi 11 unit atau 100%.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.300.000 dipergunakan untuk pengiriman surat /dokumen dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.300.000 atau 100%. Target capaian kinerja 1 Laporan dan sudah terealisasi 100% sebanyak 1 Laporan
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi dana sebesar Rp. 88.353.000 dipergunakan untuk pembayaran jasa listrik, air dan telpon/wifi, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.539.588 atau 86,63% dan target capaian kinerja sebanyak 1 Laporan. Ada sisa anggaran sebesar Rp. 11.813.412 dari kelebihan biaya untuk pembayaran air dan wifi/telpon sedangkan untuk capaian kinerja terealisasi sebanyak 1 Laporan atau 100%
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dana yang dialokasikan sebesar Rp. 175.906.900 dipergunakan untuk pembayaran honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, honorarium PHL, dan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi non PNS dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 174.813.400 atau 99,38% dan target capaian kinerja sebanyak 1 Laporan. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.093.500 dikarenakan adanya sisa dana dari belanja ATK sedangkan untuk capaian kinerjanya 100% sebanyak 1 Laporan
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau

Lapangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 180.750.000 dipergunakan untuk pembayaran jasa pemeliharaan kendaraan operasional, pajak dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 179.682.868 atau 99,41%, ada sisa anggaran sebesar Rp. 1.067.132 sedangkan target capaian sudah mencapai 100% untuk 13 unit selama 1 tahun. Sehingga kelebihan dana tersebut sudah tidak dipergunakan lagi

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dana yang dialokasikan sebesar Rp. 26.2600.000 digunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 26.244.000 atau 99,94%. Sedangkan target capaian kinerja sebanyak 38 unit dan terealisasi sebanyak 38 unit atau 100%
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.799.570 yang dipergunakan untuk pemeliharaan gedung kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.301.000 atau 90,68%. Ada sisa anggaran sebesar Rp. 2.498.570. Sedangkan target capaian untuk 2 unit pemeliharaan Gedung sudah 100%

2. Program Pembinaan Perpustakaan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.932.000 dipergunakan untuk laporan statistik perpustakaan sebesar Rp. 3.509.499 atau 89,25%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 475.181 dari belanja ATK dengan target capaian kinerja sebanyak 4 Layanan atau 100%
- Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka dengan alokasi dana sebesar Rp. 5.397.500 dan target capaian kinerja sebanyak 300 eksemplar dipergunakan untuk mengelola bahan pustaka dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.922.319 atau 91,20%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 475.181 dari belanja ATK dengan realisasi capaian kinerja 300 eksemplar atau 100%
- Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.889.100 dan target capaian kinerja sebanyak 20 Perpustakaan digunakan untuk pembinaan perpustakaan sekolah di kabupaten kepulauan selayar dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 30.542.823 atau 98,88% dan realisasi dan realisasi capaian kinerja 20 Perpustakaan atau 100%

b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu :

- Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan alokasi dana sebesar Rp. 8.498.700 dan target capaian kinerja sebanyak 1 kali pelatihan literasi berbasis inklusi sosial dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.112.109 atau 95,45%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 386.591 dari belanja ATK dengan capaian kinerja sebanyak 1 kali pelatihan literasi berbasis inklusi sosial atau 100% terealisasi.
- Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.594.300 dan target capaian sebanyak 1 lokus lomba mewarnai anak TK dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 4.392.441 atau 95,61% dan terdapat sisa dana sebesar Rp. 201.859 dari belanja ATK dengan capaian kinerja sebanyak 1 lokus atau 100%.

3. Program Pengelolaan Arsip dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.132.100 dipergunakan untuk pendataan arsip setiap OPD, Kecamatan, Kelurahan/Desa dengan target capaian kinerja sebanyak 20 Arsip dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.447.949 atau 92,51%, dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 684.152 dari belanja ATK sedangkan capaian kinerja sebanyak 20 Arsip atau 100%

b. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN dengan alokasi dana sebesar Rp. 0 dan target capaian kinerja sebanyak 0 Pengguna. Pada perubahan anggaran kegiatan ini tidak dilaksanakan karena adanya efisiensi anggaran.
- Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana sebesar Rp. 15.341.700 dan target capaian kinerja sebanyak 1 Laporan. Realisasi keuangan sebesar Rp. 10.780.300 atau 70,27%. Terdapat sisa dana sebesar Rp. 4.561.400 dari belanja ATK dan juga ASN yang melakukan perjalanan dinas luar daerah menggunakan tarif hotel dibawah standar DPA. dengan realisasi kinerja sebanyak 1 Laporan atau 100%.

4. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Autentikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :
 - Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjamin Keabsahan Arsip dengan alokasi dana sebesar Rp. 21.235.200 dan target capaian kinerja sebanyak 20 Arsip dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.043.654 atau 99.10% ada sisa anggaran sebesar Rp. 191.546 dari belanja ATK sedangkan capaian kinerja sebanyak 20 Arsip atau 100%

Secara keseluruhan realisasi keuangannya 93,77% atau sebesar Rp. 2.965.472.335,- (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dari total anggaran sebesar Rp. 3.162.413.000,- (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah). Sedangkan target capaian kinerja dari keseluruhan program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah mencapai target yaitu 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2025.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah :

- Masih banyak permasalahan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Selayar yang belum diakomodir lewat dana APBD Kabupaten setiap tahunnya.
- Sumber Daya Aparatur di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang masih kurang sehingga pelayanan belum optimal.
- Kelemahan utama perpustakaan selama ini adalah kurangnya koleksi bahan pustaka baru setiap tahunnya. Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada dan untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluarsa untuk distock opname.
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan budaya literasi.
- Minimnya ketersediaan gedung perpustakaan yang strategis dan memadai terutama pada pemerintah desa dan lembaga pendidikan (banyak yang belum memiliki gedung tersendiri).

Solusi

yang dapat memecahkan permasalahan diatas atau setidaknya dapat mengurangi dampak masalah yang timbul adalah :

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan promosi perpustakaan untuk mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan serta pembudayaan gemar membaca.
- Memberikan usulan penambahan jumlah formasi tenaga perpustakaan dan kearsipan.
- Melakukan penambahan jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan usulan pemustaka/masyarakat, memberikan bantuan bahan pustaka pada perpustakaan sekolah dan desa serta meningkatkan khasanah koleksi muatan lokal Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Diharapkan Kepada Pemerintah agar mengalokasikan penambahan anggaran melalui APBD untuk Tahun Anggaran berikutnya.

2.1.2 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket
1	2		3	4	$5=(4/3)*100$	6
1	Urusan Perpustakaan					
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan					
	1. Persentase Desa yang Memiliki Perpustakaan Desa	%	32,09	100	100	
2	Urusan Kearsipan					
	1. Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Baku	SKPD %	8 (18,18%)	15 (26,31%)	100	
3	Reformasi Birokrasi					
	1. Nilai SAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sakala Predikat	B	CC	55,50	
	2. Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan		Sesuai	Sesuai	100	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	%	80	83	100	

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 telah mencapai 100% bahkan rata-rata indikator kinerja melebihi target yang ditentukan.

2.1.3 CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN URUSAN

NO	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	Ket
1	2	3	4	5	6=(5/4)*100	7
1	Urusan Perpustakaan					
	1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	4,70	56,24	1.196	
	2. Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	%	83,00	0	0	Anggarannya Tidak Tersedia
2.	Urusan Kearsipan					
	1. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009) tentang Kearsipan	%	95,00	75	78,94	
	2. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan public dan kesejahteraan rakyat	%	97,50	50,00	51,28	
	3. Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasia	%	100	0	0	Anggarannya Tidak Tersedia

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa indikator kinerja untuk nilai tingkat kegemaran membaca capaian kinerjanya sudah melampaui target yaitu sebanyak 56,24% dari target capaian sebesar 4,70%, untuk tahun 2025 hasil penilaian dan kajian TGM dilakukan oleh Perpustakaan RI. Selanjutnya indikator kinerja tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009) tentang Kearsipan dan tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat belum mencapai target disebabkan keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk indikator kinerja Persentase Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi dan Persentase Arsip dapat Diakses yang Sifatnya Tertutup/Rahasia tidak dianggarkan dalam RKPD disebabkan terbatasnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2025 belum berhasil mencapai target disebabkan terbatasnya anggaran.

2.1.4 ANALISIS KESESUAIAN ANTARA KEGIATAN DENGAN TARGET KINERJA PROGRAM YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERJANJIAN KINERJA

No	Urusan Pemerintahan Daerah/ Organisasi Perangkat Daerah	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Capaian Realisasi Anggaran (%)	Jumlah Indikator Kinerja Program	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Program (%)	Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan	Rata-Rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (%)
1	2	3	4	5=4-3	6=(4/3)*100	7	8	9	10
1	Urusan Perpustakaan								
.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp. 3.162.413.000,-	Rp. 2.965.472.335,-	Rp. 196.940.665,-	93,77	4	100	13	100

Dari tabel diatas dijelaskan :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerjanya yaitu Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dan pelaporan administrasi dengan realisasi capaian kinerja 100% dan realisasi keuangannya sebesar Rp. 2.873.721.241,- atau 93,81% dari total anggaran Rp. 3.063.392.400,-
Adapun kegiatan yang dilaksanakan ada 8 kegiatan yaitu:
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 7 indikator Dengan realisasi target capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.941.829,- atau 82,50% dari total anggaran sebesar Rp. 16.900.000,-
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 3 indikator Dengan realisasi target capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.079.111.151,- atau 92,83% dari total anggaran sebesar Rp. 2.239.633.230,-
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 indikator Dengan realisasi target capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.708.128,- atau 85,98 % dari total anggaran sebesar Rp. 13.617.800,-
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator dengan realisasi target capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 300.000,- atau 100% dari total anggaran sebesar Rp. 300.000,-
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan jumlah indikator sebanyak 6 indikator Dengan realisasi target capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 219.559.575,- atau 97,08% dari total anggaran sebesar Rp. 226.161.900,-
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah indicator sebanyak 1 indikator dengan realisasi target capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 66.219.702,- atau 98,23% dari total anggaran sebesar Rp. 67.410.000,-
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan jumlah indikator sebanyak 3 indikator Dengan realisasi target capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 252.652.988,- atau 95,14% dari total anggaran sebesar Rp. 265.559.900,-

Adapun kegiatan yang dilaksanakan ada 1 kegiatan yaitu:

- a. Autentikasi Arsip Statis dan Hasil Alih Media Kabupaten/Kota dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 1 indikator Dengan realisasi target capaian 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.043.654,- atau 99,10% dari total anggaran sebesar Rp. 21.235.200,-

dari 4 indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan semuanya telah mencapai target 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian kinerja program dan kinerja kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan rata-rata mencapai 100% sedangkan realisasi keuangannya sebesar 93,77% pencapaian realisasi tersebut secara umum dianggap baik karena berada diatas 90%.

2.1.5. INOVASI

NO	URAIAN INOVASI	MAKSUD DAN TUJUAN INOVASI	HASIL/ MANFAAT	KET.
1	2	3	4	5
	NIHIL	NIHIL -	NIHIL -	

2.1.6. PRESTASI/ PENGHARGAAN

No.	Nama Penghargaan	Tingkat				Diselenggarakan oleh/ Penyelenggara	Ket.
		Internasional	Nasional	Provins	Kabupaten		
1	2	3	4	5	6	7	8
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	

2.2. KEBIJAKAN DAERAH (PERDA, PERBUP DAN KEPUTUSAN BUPATI) YANG DIINISIASI OLEH PERANGKAT DAERAH DAN DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH

Pada tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Belum terdapat Kebijakan (Perda, Perbup dan Keputusan Bupati) yang Diinisiasi oleh Perangkat Daerah dan Ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam satu tahun anggaran.

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum		Tujuan / Masalah Yang Diselesaikan	Ket.
		Nomor/ Tanggal Pengesahan	Tentang		
1	2	3	4	5	6
1	Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip	Nomor 6 6 Tahun 2024/ 2 Februari 2024	Kode Klasifikasi Arsip	Terciptanya Klasifikasi Arsip yang Baik	

2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TERHADAP LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Rekomendasi DPRD	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
	NIHIL	NIHIL	NIHIL

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUANDAN PENUGASAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar termasuk dalam urusan wajib tetapi bukan pelayanan dasar yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan bidang perpustakaan dan kearsipan pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2025 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Selayar tidak melaksanakan atau tidak memiliki tugas pembantuan dan penugasan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025 mencapai 93,77% atau sebesar Rp.2.965.472.335 dari total anggaran sebesar Rp.3.162.413.000 pencapaian realisasi tersebut secara umum dianggap baik karena berada di atas 90%. Sedangkan realisasi capaian kinerja juga sudah berhasil mencapai target 100% sesuai yang ditentukan dalam perjanjian kinerja.
2. Terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 pada saat ini masih terdapat permasalahan yang menyangkut kinerja OPD yaitu pelayanan perpustakaan yang belum optimal karena sarana dan prasarana kearsipan yang belum memadai.
3. Minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Bahkan terkadang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan didukung dengan anggaran nol rupiah dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

B. Saran

1. Urusan bidang Perpustakaan dan Kearsipan merupakan urusan wajib tetapi bukan pelayanan dasar hendaknya mendapat perhatian dan apresiasi yang baik dari Pemerintah Daerah karena merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan menciptakan pemerintahan transparan dan akuntabel melalui penyediaan anggaran dalam jumlah memadai untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Kerjasama di bidang perpustakaan dengan berbagai pihak perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kunjungan perpustakaan, jumlah judul dan koleksi buku.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.

Kepulauan Selayar, Januari 2026

**Kepala Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan**

Drs. H. ANDI NUR HALIQ, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660507 198603 1 022